ANALISIS *DECISION-MAKING PROCESS* TERHADAP INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) PERSPEKTIF PEMERINTAH INDONESIA

SKRIPSI

Disusun oleh

Farah Diba Tanzilla

NIM: 16323022

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS *DECISION-MAKING PROCESS* TERHADAP INDONESIA-JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) PERSPEKTIF PEMERINTAH INDONESIA

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
15 September 2020

Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

(Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A)
NIK. 123230101

Dewan Penguji:	Tanda Tangan
1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
2 Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.	
3 Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A.	

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada tindakan plagiasi seperti yang tercantum dalam pedoman penulisan skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Apabila di kemudian hari terbukti bawa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademis dari Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 September 2020

Penulis,



Farah Diba Tanzilla

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil'alamin
Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

Ayah dan Ibu

Atas segala pengorbanan yang Ayah dan Ibu telah lakukan untuk penulis selama ini, baik dalam hal moril maupun materil. Semoga Allah SWT. Memberikan balasan atas cinta dan jerih payah Ayah dan Ibu dengan kebaikan yang lebih mulia.

Migo dan Panji

Kedua adik penulis, atas segala doa, dukungan dan kasih sayang yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi sosok yang lebih baik dan tauladan untuk adik-adik.

Keluarga Besar dan Sahabat

Atas segala doa, nasihat dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

HALAMAN MOTTO

Indeed, this is for you a reward, and your effort has been appreciated.
(Qur'an Al-Insan:22)

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah Subhanallahu wa ta'alla, atas nikmat dan rahmat-Nya, atas segala kelancaran, kekuatan, kesehatan dan kemudahan sehingga karya tulis ini dapat selesai dengan baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan, oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Fu'ad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan dosen penguji skripsi yang selalu memberikan nasihat, motivasi, dan membimbing penulis selama masa perkuliahan.
4. Ibu Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, atas arahan dan perhatian kepada penulis selama ini. Atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja penulis memohon maaf.
5. Bapak Geradi Yudhistira, S.Sos., M.A. selaku Dosen Program Studi Hubungan Internasional sekaligus dosen penguji skripsi yang telah membimbing, memudahkan penulis dalam penyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.

7. Ibu Latifatul Laili, S.Psi.,M.Psi. selaku Dosen Program Studi Psikologi FPSB yang telah meluangkan tenaga dan waktu, terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan kepada penulis Semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala kebaikan dengan yang lebih mulia.
8. Bapak Taswin Hasbullah, M.M., M.B.A., dan Ibu Lingga Kagungan, S.H. selaku kedua orang tua tercinta yang tiada hentinya memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan pengorbanan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih Ayah dan Ibu, peluh dan air mata yang Diba curahkan selama masa perantauan 4 tahun terakhir hingga terselesaikannya skripsi ini, tak sebanding dengan pengorbanan Ayah dan Ibu hingga Diba bisa berada disini dan meraih gelar sarjana.
9. M. Novo Al-Fajri, Notario Panji Negara, M.Ridho Makarim, M. Faridz Makarim selaku adik – adik penulis yang telah menjadi penghibur hati penulis di masa perkuliahan hingga saat penulisan skripsi. Terima kasih atas doa, perhatian, kata-kata manis dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
10. Ibu Rohani Yazid (Atu Neng) dan Bapak Akram Pasya (Atu Akam) selaku nenek dan kakek penulis, yang senantiasa menjadi tempat berkeluh kesah dan mengadu selama masa perkuliahan hingga saat pengerjaan skripsi. Terima kasih atas kesabaran, doa, kasih sayang, semangat, kepercayaan dan segala yang telah dicurahkan kepada penulis. Semoga Allah SWT. memberikan penulis kesempatan untuk membalas jasa Atu berdua.
11. Ibu Dra. Dian Kagungan, M.H. (Mamah) dan Bapak Ir. Rozi Hasyim (Papah) selaku paman dan bibi penulis yang selama ini senantiasa memberikan motivasi, perhatian dan kasih sayang layaknya kepada anak kandung sendiri, terima kasih mamah dan

papah semoga Allah SWT. senantiasa membalas segala kebaikan dengan yang lebih mulia.

12. Widya Khairunnisa, Trias Atika, Lanina Aprilia, Selina P. Gandi, Elfa Yusmita A., Novita Sarah, Dhiki Wisnu, Arief Kurniawan, Fazri Hardino, Keysha Sabrina, Bima P. Manaf, Sukma Radika dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, selaku sahabat penulis selama masa perkuliahan, terima kasih atas perhatian, pengertian dan lelucon selama ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PENGESAHAN ii
HALAMAN PERNYATAAN..... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv
HALAMAN MOTTO..... v
PRAKATA..... vi
DAFTAR ISI. ix
DAFTAR TABEL..... x
DAFTAR SINGKATAN xi
ABSTRAK..... xii

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang. 1
1.2. Rumusan Masalah. 6
1.3. Tujuan Penelitian. 6
1.4. Signifikansi Penelitian. 6
1.5. Cakupan Penelitian..... 6
1.6. Tinjauan Pustaka 7
1.7. Landasan Teori 13
1.8. Metode Penelitian. 16
1.8.1. Jenis Penelitian 16
1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian 16
1.8.3. Metode Pengumpulan Data 16
1.8.4. Proses Pengumpulan Data 17

BAB II DINAMIKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN IJEPA PERSPEKTIF PEMERINTAH INDONESIA 19
2.1. Hubungan Kerja Sama Indonesia-Jepang Sebelum IJEPA 19
2.2. Strategi Indonesia dalam Persiapan Pembentukan IJEPA 21
2.3. Tujuan Indonesia dalam Pembentukan Kerja Sama IJEPA 25

BAB III ANALISIS RATIONAL ACTOR TERHADAP KERJA SAMA IJEPA PERSPEKTIF PEMERINTAH INDONESIA 27
3.1. Goals Perspektif Pemerintah Indonesia dari IJEPA..... 27
3.2. Alternative Perspektif Pemerintah Indonesia dari IJEPA 29
3.3. Consequences Perspektif Pemerintah Indonesia dari IJEPA..... 31
3.3.1. *Cost, Benefit* dan *Constraints* Bagi Indonesia dari IJEPA ..31
3.3.2. *Cost, Benefit* dan *Constraints* Bagi Indonesia Apabila Menolak IJEPA.... 35
3.4. Choice Perspektif Pemerintah Indonesia dari IJEPA..... 37

BAB IV KESIMPULAN 43
4.1. Kesimpulan. 43
4.2. Saran dan Rekomendasi 46

DAFTAR PUSTAKA xiii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Linimasa proses pembentukan IJEPA..... ...2

DAFTAR SINGKATAN

APEC	:	Asia-Pacific Economic Cooperation
ASEAN	:	Association of South East Asian Nations
FDI	:	Foreign Direct Investment
IGGI	:	Inter-Govermental Group on Indonesia
IJEPA	:	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement
MIDEC	:	Manufacturing Industry Development Centre
NTM	:	Non-Tariff Measurement
PMA	:	Penanaman Modal Asing
USD	:	United States Dollar
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SMEs	:	Small and Medium-Scale Enterprises
UKM	:	Usaha Kecil Menengah
WTO	:	World Trade Organization

ABSTRAK

IJEPA merupakan perjanjian bilateral pertama bagi Indonesia. Perjanjian ini termasuk dalam kategori kesepakatan kerja sama yang lebih luas dari yang pernah diikuti oleh Indonesia. Dalam perjanjian IJEPA terjadi tarik menarik kepentingan yang sangat terlihat dalam proses pembuatan kebijakan perkonomian negara, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keputusan Indonesia untuk menyetejui tawaran dari pihak Jepang untuk membuat sebuah perjanjian kerja sama merupakan hal yang paling rasional untuk dilakukan. Persetujuan tersebut dilakukan bukan tanpa pertimbangan antara alternatif penawaran dan konsekuensi yang dapat terjadi apabila Indonesia menolak tawaran tersebut. Di sisi lain, tawaran dalam perjanjian IJEPA dibutuhkan oleh Indonesia, seperti pembangunan kapasitas baik pada sektor industri maupun sumber daya manusia dan kemudahan akses bagi sektor ekspor-impor dengan pihak Jepang. Pemerintah Jepang mampu untuk memenuhi aspek-aspek yang menjadi dasar pembuatan suatu perjanjian kerja sama yang sejalan dengan model rasional teori *decision-making process* yaitu adanya kejelasan masalah, orientasi tujuan, alternatif dan konsekuensi, serta potensi maksimal.

Kata Kunci: IJEPA, *decision-making process*, kejelasan masalah, orientasi tujuan, alternatif dan konsekuensi, potensi maksimal.

ABSTRACT

IJEPA is the first bilateral agreement for Indonesia. This agreement falls into a broader category of cooperation agreement than Indonesia has ever got in to. In IJEPA agreement, there was a tug of war that was very visible in the country's economy policy-making process. Based on the analysis that has been done, Indonesian government's decision to accept the offer from Japan to make this cooperation agreement was the most rational thing to do. The agreement itself was not made without long consideration between the offer and the consequences that could happen if Indonesia rejected the offer. On the other hand, the offering in IJEPA agreement is needed by Indonesia, such as capacity building for both industry and human resources also access to the export-import sector to Japan. Japanese government was able to fulfill the aspects that form the basis of agreement making that in line with the rational model of the decision-making process theory, such as clarity of the problem, objective orientation, alternatives and maximum potential.

Keyword: IJEPA, decision-making process, clarity of the problem, objective orientation, alternatives and maximum potential.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hubungan kerja sama merupakan hal yang sangat dibutuhkan antara satu negara dengan negara lain untuk saling melengkapi kebutuhan, baik terjalin dalam hubungan bilateral maupun multilateral. Kebutuhan setiap negara terus menerus meningkat dan hal tersebut menyebabkan ketergantungan antar negara semakin meningkat pula. Berbicara kebutuhan tentu tak lepas dari sektor ekonomi. Ketergantungan ekonomi antar negara merupakan salah satu kondisi dasar di dalam melakukan hubungan internasional, tidak satupun negara secara ekonomi dapat berdiri sendiri dalam jangka waktu yang lama. Demi kemampuan untuk melangsungkan hidup dalam waktu lama, membuat negara tidak memiliki pilihan selain untuk menjalin kemitraan baik perdagangan maupun kerja sama lain dengan negara-negara dibelahan dunia yang lainnya.

Hubungan internasional dalam kerja sama ekonomi merupakan hal yang lazim terjadi, pada umumnya akan dituangkan kedalam sebuah perjanjian yang mengikat pihak - pihak yang bersangkutan, seperti kerja sama antara Negara Jepang dengan Indonesia. Kerja sama yang terbentuk antara pemerintah Indonesia dan Jepang terutama di bidang ekonomi diperkuat dengan adanya perjanjian tertulis diantara kedua pihak, yaitu Indonesia *Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). IJEPA akhirnya terbentuk setelah melalui proses yang panjang yaitu sejak tahun 2003-2005.

Tabel 1 : Proses Perundingan IJEPA

Tahun	Isi Perundingan
2003	Perjanjian IJEPA di laksanakan di Tokyo, 23 Juni Pertemuan PM Joichiro Koizumi &Presiden Megawati Soekarnoputri, sepakat melakukan penjajakan pembentukan kemitraan ekonomi Indonesia – Jepang
2004	Kedua negara menyelesaikan *Joint Study Group* (JSG) pembentukan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia – Jepang.
2005	Pertemuan PM Joichiro Koizumi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengumumkan dimulainya perundingan IJEPA
2007	Penyelesaian Perundingan IJEPA Kedua negara menyelesaikan perundingan IJEPA setelah melewati 7 (tujuh) putaran perundingan.
2008	Perjanjian IJEPA resmi berlaku (*entry into force*).

Sumber : (KEMENDAG, 2018)

Wacana pengadaaan kerja sama bilateral antara kedua negara diawali dengan adanya kesepakatan melakukan penjajakan pembentukan kemitraan ekonomi Indonesia di tahun 2003, tepatnya pada 23 Juni 2003 di Tokyo, diadakan pertemuan antara Presiden RI kala itu Megawati Soekarnoputri dengan PM Jepang Joichiro Koizumi untuk membahas kesepakatan tersebut (Kemendag, 2018). Lalu pada tanggal 8 September 2003, Jepang dan Indonesia berdiskusi mengenai ide Economic Partnership Agreement (EPA) di Tokyo. Namun, pada diskusi pertama ini Indonesia tidak merespon segera, hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia beranggapan bahwa perjanjian bilateral tidak akan memberi manfaat kepada mereka. Pada waktu itu, Menteri Ekonomi Indonesia berpendapat bahwa dalam perjanjian ini terlihat seperti Indonesia tidak memiliki kepentingan apapun di dalam isi perjanjian. Oleh karena itu Indonesia akan mendapatkan manfaat yang lebih sedikit daripada negara donor yang mengajukan FTA/ETA dalam kasus ini adalah Jepang (Bandoro, 2010).

Pada Mei tahun 2004, Indonesia dan Jepang berhasil menyelesaikan Joint Study Group pembentukan kemitraan ekonomi koprehensif antara kedua negara (Kemendag, 2018). Di tahun 2005 tepatnya pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kunjungan kenegaraan oleh kepala Nippon Keidanren, Hiroshi Okuda yang bermaksud untuk menyimpulkan perjanjian-perjanjian antara Jepang dengan negara-negara ASEAN salah satunya Indonesia. Menurut Okuda, Presiden Yudhoyono meyakinkan bahwa Indonesia akan mengambil tindakan inisiatid untuk melanjutkan diskusi EPA yang sudah di mulai pada era presiden sebelumnya yaitu Presiden Megawati (Times, 2004)

Presiden Yudhoyono menyatakan pentingnya FTA/EPA Jepang-Indonesia sebagai sarana untuk mempromosikan hubungan ekonomi yang lebih baik antara kedua negara, pernyataan ini disaksikan oleh PM Jepang Junichiro Koizumi (KEMLU, 2005). Menindaklanjuti hal tersebut, Jepang dan Indonesia mengadakan diskusi antara menteri ekonomi, perdagangan dan industri Jepang, Shoici Nakagawa, dan menteri koordinator ekonomi Indonesia, Aburizal Bakrie, pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembangunan EPA dan penawaran insentif investasi yang ditujukan kepada Presiden Yudhoyono (Witular, 2004).

Dua tahun setelah berdirinya kelompok studi bersama dan beberama putaran pertemuan serta diskusi, pada tahun 2005 Jepang dan Indonesia sepakat untuk melakukan negosiasi terkait FTA/EPA. Sebelum perjanjian IJEPA didirikan pada tahun 2007, negosiasi antara kedua negara tidak berjalan dengan baik, sebab baik Jepang maupun Indonesia memiliki kepentingan

nasionalnya sendiri. Masing-masing memiliki penolakan yang tinggi dalam beberapa aspek dan ruang lingkup persetujuan. Setelah tujuh putaran perundingan, IJEPA mulai berlaku pada tahun 2008 (Kemendag, 2018).

Kesepakatan perdagangan bebas dalam perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh Presiden ke - 6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal20 Agustus 2007. Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian ini melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 (KemenkumHAM, 2008). Perjanjian ini disusun agar menghasilkan manfaat dan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak, diukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerja sama melalui pengembangan kapasitas di sektor industri prioritas. Mencakup berbagai kemitraan ekonomi, seperti pembangunan kawasan perdagangan bebas, investasi dan kesepakatan dalam bidang lingkup energi (Setiawan, 2012).

Di dalam perjanjian IJEPA, menyebutkan bahwa Jepang akan berkomitmen untuk membantu pihak Indonesia untuk meningkatkan kapasitas industrinya (*Capacity Building*) agar produk dan jasa nya bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh pasar Jepang melalui beragam elemen perjanjian (Atmawinata, 2008). Menurut data dari tahun 2017, Investasi Jepang ke Indonesia mencapai USD 4.9 miliar dengan sektor investasi utama yakni sektor listrik, gas & air, industri alat angkutan & transportasi, industri logam dasar, barang logam, serta mesin dan elektronik (Kemendag, 2018). Meskipun nilai investasi Jepang ke Indonesia terbilang cukup fantastis, namun menurut Kementerian Perindustrian RI, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang

signifikan dari kerja sama ekonomi dengan Jepang dalam kerangka IJEPA yang telah dilangsungkan sejak tahun 2008 (Kemenperin, 2017).

Ekspor produk hasil industri yang bernilai tinggi dari Indonesia sejauh ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan tren ekspor Indonesia ke Jepang merosot rata-rata 6,6 % per tahun. Sebaliknya pertumbuhan impor Indonesia dari Jepang justru meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25% per tahun (Kemenperin, 2017). Berdasarkan dari 13 industri yang menjadi fokus, ternyata hanya terdapat lima sektor yang implementasi nya cukup baik yakni pengelasan, percetakan dan pemotongan logam, otomotif, elektronik, dan konservasi energi. Jepang memanfaatkan IJEPA untuk mengekspor sumber daya alam mentah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Sebaliknya kini justru perusahaan manfaktur berjaya di Indonesia dan dinilai memberikan ketergantungan pada Indonesia terhadap Jepang (Kemenperin, 2017). Berdasarkan pada pemaparan di atas, penelitian ini akan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi persetujuan pemerintah Indonesia dengan Jepang dalam IJEPA.

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa Indonesia menyetujui perjanjian IJEPA dengan Jepang?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui mengapa Indonesia bersedia membentuk perjanjian kerja sama IJEPA.
2. Untuk mengetahui aspek politik perjanjian kerja sama IJEPA.

1.4. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena kerja sama IJEPA merupakan kerja sama ekonomi bilateral pertama yang dilaksanakan Indonesia yang secara tidak langsung setelah lebih dari satu dekade keberlangsungannya, tentu mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu perlu dikaji kembali apakah penyebab atau alasan yang melatarbelakangi persetujuan akan perjanjian IJEPA, sebagai pertimbangan akan kesiapan pemerintah Indonesia kala itu dalam keputusan pembentukan perjanjian bilateral dengan Jepang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian terdahulu, dalam penelitian ini akan mengkaji alasan dari pemerintah Indonesia menyanggupi tawaran pemerintah Jepang untuk melakukan kerja sama bilateral IJEPA serta dianalisis melalui perspektif teori hubungan internasional yang mana belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

1.5. Cakupan Penelitian

Dalam topik ini, penulis akan menganalisis alasan dari pemerintah Indonesia menyanggupi tawaran pemerintah Jepang untuk membentuk IJEPA khususnya dari tahun 2003 – 2007 yaitu sejak adanya wacana melakukan penjajakan pembentukan kerja sama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang hingga akhirnya menghasilkan perjanjian IJEPA.

1.6. Tinjauan Pustaka

Tinjauan terkait latar belakang hubungan antara Jepang dan Indonesia terbagi atas dua masa yaitu hubungan Indonesia-Jepang pasca kemerdekaan

Indonesia hingga Orde Lama dan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Lama, sejarah hubungan kerja sama antara Jepang dan Indonesia diawali dengan ditandatanganinya perjanjian perdamaian antara Jepang dan Indonesia, serta Perjanjian Pampasan Perang pada tanggal 20 Januari 1958 di Jakarta. Disebutkan dalam perjanjian tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengangkat wakil masing-masing negara yaitu Aiichiro Fujiyama selaku Menteri Luar Negeri Jepang dan Soebandrio selaku Menteri Luar Negeri Indonesia untuk memeriksa surat kuasa masing-masing dan menandatangani perjanjian yang telah disepakati. Dalam perjanjian tersebut tepatnya dalam pasal tiga, telah disebutkan adanya harapan dari kedua belah pihak untuk melangsungkan kerja sama dalam bidang ekonomi sejalan dengan keputusan yang dibuat dalam Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung tanggal 18 – 24 April tahun 1955 (gwu.edu, 2019).

Dikutip dari Kementrian Perdagangan RI, kemitraan ekonomi Indonesia Jepang dalam IJEPA merupakan perjanjian bilateral pertama bagi Indonesia. Secara umum, perjanijan ini memiliki cakupan yang luas dengan tujuan mempererat kemitraan ekonomi di antara kedua negara, termasuk kerja sama di bidang peningkatan kapasitas, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada investasi, peningkatan arus barang dan pergerakan tenaga kerja diantara kedua negara (Kemendag, 2018).

IJEPA merupakan pelengkap dari kerja sama regional seperti ASEAN plus, APEC dan WTO. IJEPA bertujuan untuk meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia & Jepang, serta pasar regional melalui 3 pilar utama yakni liberalisasi, fasilitasi dan peningkatan kapasitas (*Capacity Building)*

(KEMENDAG, 2018). Dengan alasan tersebut, Jepang tertarik membantu Indonesia untuk meningkatkan kemakmuran, sementara itu Jepang mengambil keuntungan dari tingkat upah yang murah dan sumber daya alam yang besar. Di samping itu Jepang juga sangat berkepentingan menjaga pasokan energi yang stabil dan berkesinambungan.

Pada mulanya Jepang memandang Asia sebagai pasar yang signifikan dan luas dengan prospek cerah bagi pertumbuhan di masa depan. Banyak negara di wilayah tersebut telah berhasil melakukan transisi dari substitusi impor ke ekonomi berorientasi ekspor, termasuk Indonesia yang mampu mengatasi krisis moneter tahun 1997-1998. Perjanjian IJEPA disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara adil, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas.

Sektor-sektor tersebut mencakup sebelas kelompok perundingan yaitu *Trade in Goods, Rules of origin, Customs Procedures, Trade in Services, Investment, Movement of Natural Persons, Goverment Procurement, Intellectual Property Rights, Competition Policy, Energy and Mineral Resources* dan yang terakhir *Cooperation*. Perjanjian perdagangan IJEPA didalamnya terdapat 15 bagian aturan yang terdiri dari 154 pasal serta 12 aturan tambahan (*annexes*) dalam penerapan perjanjian perdagangan IJEPA sendiri, peraturan tersebut berguna untuk menjaga kelancaran pelaksanaan perjanjian juga untuk menyelesaikan masalah apabila terjadi suatu sengketa (Komala, 2008).

Sedangkan tinjauan setelah diterapkannya IJEPA selama kurang lebih satu dekade, berdasarkan Jurnal dari Kementerian Perdagangan RI yang ditulis oleh Muhammad Fawaiq membahas tentang kerja sama IJEPA di sektor jasa lebih membuka peluang bagi Indonesia untuk mengekspor sektor jasanya. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Schedule of Commitment* (SOC), *Indeks Hoekman* dan *Mode of Supply* dalam perdagangan jasa.

Penelitian ini mengungkapkan pemanfaatan sektor jasa Jepang oleh Indonesia hanya terbatas pada jasa perawat medis dan perawat lansia atau *caregiver*. Menurut data dari kementerian perdagangan, jumlah penerimaan pekerja perawat lansia sempat meningkat drastis di tahun 2009 yaitu sebanyak 104 orang pekerja di tahun 2008 dan 189 orang pekerja di 2009. Namun mengalami penurunan hingga hanya 77 orang pekerja di 2010, 58 orang pekerja di 2011. Hingga akhirnya mulai meningkat sebanyak 72 orang pekerja di 2012, 108 orang pekerja di 2013, 146 orang pekerja di 2014, 212 orang pekerja di 2015, 233 orang pekerja di 2016 dan 295 pekerja di 2017. Kenaikan jumlah peminat akan pekerja perawat lansia juga dipengaruhi oleh tingginya jumlah manula yang ada di Jepang (Kemendag, 2018).

Sedangkan untuk jasa perawat medis juga meningkat jumlah penerimaannya satu tahun pasca diberlakukannya IJEPA yaitu di tahun 2009 sebanyak 173 orang pekerja, yang sebelumnya di 2008 sebanyak 104 orang pekerja. Lalu penerimaan mengalami penurunan drastis hingga hanya sebanyak 39 orang pekerja di tahun 2010, 47 orang pekerja di 2011, 29 orang pekerja di 2012, 48 orang pekerja di 2013, 41 orang pekerja di 2014, 66 orang pekerja di

2015, 46 orang pekerja di 2016, dan 29 orang pekerja di 2020 (Kemendag, 2018).

Peluang ekspor tertinggi Indonesia ke Jepang terdapat pada sektor jasa moda 3 yaitu *Commercial Presence* dan moda 4 *Movement of Natural Persons*. Melalui perjanjian IJEPA, Indonesia mempromosikan sektor jasa nya ke Jepang dan kemudian melakukan negosiasi terkait penghapusan hambatan-hambatan yang ada pada sektor jasa. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dapat memanfaatkan sektor jasa dari Jepang. Di antaranya yaitu 27 sub sektor yang didominasi oleh sektor jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan, jasa keuangan, jasa kesehatan dan terkait dengan sosial, jasa pariwisata, jasa rekreasi, budaya, olahraga, jasa transportasi dan sub-sektor jasa lainnya. Pemanfaatan peluang sektor jasa melalui perjanjian IJEPA diberikan oleh Jepang kepada Indonesia guna menghasilkan potensi akses pasar sektor jasa yang besar bagi Indonesia, dan dapat disimpulkan bahwa IJEPA hanya memberikan manfaat yang signifikan pada sektor tenaga kerja. (Fawaiq, 2014).

Tinjauan terkait perjanjian perdagangan IJEPA yang ditulis oleh Fawaiq, menilai bahwa IJEPA menguntungkan pada sektor jasa. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa IJEPA membantu mengurangi angka pengangguran Indonesia dengan membuka akses pertukaran tenaga kerja. Hal tersebut akan membantu penelitian ini untuk membandingkan azas kemanfaatan IJEPA bagi Indonesia.

Setiawan dalam penelitiannya mengungkapkan tentang analisis akan dampak perjanjian perdagangan IJEPA terhadap sisi ekspor kedua pihak yaitu Indonesia dan Jepang. Penelitiannya juga bertujuan untuk mengevaluasi

efektivitas kebijakan pemerintah di sektor perdagangan barang dalam kerangka IJEPA, khusunya pengaruhnya terhadap Indonesia dan Jepang dari sisi kontribusi ekspor terhadap pendapatan nasional dan peningkatan pertumbuhannya. Secara Eknomi, tidak semua sektor perdagangan dalam perjanjian IJEPA menguntungkan Indonesia. Di sektor tertentu Indonesia diuntungkan, namun pada sektor lain Indonesia dirugikan. (Setiawan, 2012)

Temuan selanjutnya yang justru menilai sebaliknya, bahwa IJEPA tidak efektif dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan. Berdasarkan hasil penelitian dari Muchamad Nur Faaiz Fathah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu terjadi perubahan pada karakteristik *foreign direct investment* (FDI) asal Jepang yang masuk ke Indonesia setelah adanya perjanjian IJEPA, khususnya pada jumlah FDI yang masuk, tenaga kerja yang diserap, sebaran sektor dan Kredit Liquiditas Bank Indonesia (KLBI) dari realisasi investasi. Setelah aktifnya kesepakatan IJEPA, jumlah FDI asal Jepang yang masuk ke Indonesia memiliki trend yang meningkat, namun tidak signifikan. Tenaga kerja yang terserap dari FDI asal Jepang meningkat secara signifikan setelah adanya kesepakatan IJEPA. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan kesepakatan IJEPA tidak efektif dalam melaksanakan tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan perkembangan daripada investasi (Achsani, 2017).

Penelitian Muchammad Nur Faaiz Fathah Achsani menilai bahwa kespakatan IJEPA tidak efektif dalam pelaksanaan tujuan yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan perkembangan Negara daripada Investasi. Namun fakta yang ditemukan justru sebaliknya, Jepang justru lebih diuntungkan dengan meningkatnya penerimaan tenaga kerja asal Jepang secara signifikan. Oleh

karena itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai alas an mengapa IJEPA tetap dilanjutkan, padahal sebagian besar temuan menunjukkan adanya ketimpangan antara keuntungan yang didapatkan untuk Indonesia dengan keuntungan pihak Jepang.

Penelitian-penelitian mengenai IJEPA yang telah dilakukan sebelumnya mayoritasnya adalah mengenai garis besar dari isi perjanjian IJEPA dan IJEPA dalam perspektif ekonomi yang membahas tentang keuntungan dan kerugian yang dihasilkan oleh perjanjian IJEPA. Sedangkan dalam skripsi ini akan mengkaji mengenai alasan pemerintah Indonesia menyetujui dibentuknya IJEPA dari perspektif ilmu hubungan internasional yang di kaji dengan teori *decision-making process* model Rational Actor.

1.7. Landasan Teori

Penelitian ini menggunakan teori *decision-making process* menurut Graham T. Allison yang dalam bukunya *Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis*, menyebutkan bahwa ada tiga paradigma yang digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri negara-negara di dunia, yaitu *Rational Actor*, *Organizational Process*, dan *Governmental Politics* (Allison G. T., 1971). Dalam model *Organizational Process* pembuatan kebijakan dikendalikan oleh pemerintah namun diserahkan kepada aparat pemerintahan melalui proses organisasi. Pemerintah hanya berperan sebagai perwakilan organisasi (Allison G. T., 1971). Setiap bagian dari organisasi memiliki aktor birokrasi yang masing-masing punya tujuan yang ingin dicapai, selain itu hasil kebijakan ditentukan oleh kepuasan dari setiap fraksi organisasi. Pengambilan keputusan dalam model ini memiliki kendala tersendiri karena adanya hierarki

dalam sebuah organisasi, dimana keputusan bulat yang disetujui semua pihak amat jarang ditemukan. Setiap kebijakan yang dipilih adalah hasil 'paling memuaskan' dari proses panjang prosedur organisasi yang ada untuk memecahkan masalah dibandingkan dengan mencari solusi optimal. Dapat disimpukan bahwa dalam model ini pengambilan keputusan secara signifikan dibatasi oleh persepsi hierarki dalam organisasi dan aturan serta prosedur yang ada. Beralih untuk mempertimbangkan aktor kebijakan, pengambilan keputusan adalah tindakan dari pemerintah sebagai perwakilan organisasi (Zelikow, 1999).

Sedangkan dalam model *Governmental Politics*, dalam proses pengambilan keputusan setiap aktor pembuat kebijakan memiliki pengaruh dan bermain secara kompetitif untuk mencapai sebuah keputusan. Pemerintah dan organisasi memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan berperan sebagai aktor politik yang mengkoordinasikan kebijakan yang akhirnya dibentuk maupun keputusan yang akhirnya dipilih.

Peneltian ini akan menggunakan model pertama dari teori *decision-making process* yaitu model *Rational Actor* untuk mengkaji terbentuknya IJEPA. Karena untuk menganalisis hubungan kerja sama kebijakan luar negeri suatu negara akan ditentukan oleh aktor negara, yang dalam hal ini mengacu pada keputusan pemerintah Indonesia untuk menyetujui tawaran Jepang untuk membentuk IJEPA, sehingga dapat digarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia menjadi aktor utama dalam pengambilan keputusan tersebut dan hal ini sesuai dengan model *Rational Actor*.

Dalam model *Rational Actor*, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang mumpuni terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan hasil dan tujuan berdasarkan situasi yang terjadi (Paramita, 2013). Tindakan yang dilakukan oleh negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara telah mempertimbangkan seluruh pilihan yang ada dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan (Scott, 2014). Dalam prosesnya, pembuatan keputusan oleh pemerintah dihadapkan dengan beragam pilihan dan kemungkinan dimana pilihan-pilihan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan yang memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai *(goals and objectives)* (Bekarekar, 2016).

Model Aktor Rasional menyatakan dalam pengambilan keputusan menjelaskan bahwa para pelaku kebijakan akan secara konsisten dan terprediksi memutuskan untuk memecahkan masalah dengan kemungkinan konsekuensi yang terjadi telah diperkirakan (Allison G. T., 1971). Model ini menekankan bahwa suatu proses pengambilan keputusan akan melewati tahapan *Goals and Objectives, Alternatives, Consequences* dan *Choice*. Keputusan yang akhirnya dibuat merupakan suatu pilihan rasional berdasarkan pertimbangan rasional dan kalkulasi dari konsekuensi yang ada sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang tepat yang dapat menguntungkan sebuah negara. Karena itu, pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah sebagai agen kebijakan yang mengetahui tindakan yang strategis. Tindakan pemerintah adalah memaksimalkan nilai atau diharapkan memaksimalkan tujuan dari kepentingan nasional (Geddes, 2005). Pemerintah dapat secara

rasional menghitung analisis biaya-manfaat dari setiap pilihan alternatif dan memutuskan yang terbaik untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan utilitas yang ada. Dalam model rasional mengasumsikan bahwa pemerintah sudah memiliki semua informasi dan alternatif untuk memeriksa situasi dan keputusan menyesuaikan dengan keadaan tertentu (Donald P. Green, Justin Fox, 2007).

1.8. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2008).

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak begitu memeengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dikarenakan hal tersebut maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.

2. Subjek Penelitian

Apabila dilihat dari sumbernya, subjek dalam penelitian kualitatif menurut Spradley terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2008). Subjek penelitian ini subjek penelitian adalah pemerintah Indonesia

(*actors*) dan objek penelitian berupa keputusan pemerintah Indonesia untuk menyetujui IJEPA (*activity*).

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang telah dikumpulkan merupakan data-data sekunder, yang artinya dalam penulisan ini penulis tidak menjalankan penelitian langsung. Metode yang dilakukan penulis merupakan sebuah studi kepustakaan. ialah dengan mengumpulkan hasil laporan dan literatur resmi dan terpercaya dari internet. Mayoritas literatur yang di ambil merupakan buku dan jurnal rujukan yang dapat menjelaskan teori dan topik pembahasan yang di ambil oleh penulis (Nazir, 2002).

4. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang mencakup perencanaan atau langkah dalam melakukan riset dimulai dari pra riset sampai dihasilkannya laporan penelitian (Sugiyono, 2008). Proses ini merupakan bagian penting karena berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Adapun proses yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pra Riset

   Pra riset merupakan kegiatan dalam persiapan penelitian, yakni mendefinisikan masalah yang layak untuk diteliti, membedah kepustakaan yang terkait dengan apa yang diteliti, memilih teori yang relevan dengan masalah yang diteliti dan dengan mempertimbangkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

2. Pengambilan Data

   Dalam proses pengambilan data riset ini mendapatkan dari sumber sekunder. Adapun yang termasuk ke dalam sumber sekunder yaitu menggunakan media tertulis seperti buku, jurnal publikasi, dan artikel ilmiah. Sumber sekunder dipilih berdasarkan pada reputasi kredibilitas media atau penerbit dan hubungannya dengan topik riset. Setelah data terkumpul maka penulis akan mengkategorikan data dan melakukan pembagian sub bab dan dilanjutkan dengan pengembangan narasi untuk menjabarkan pemahaman mengenai informasi yang ditampilkan.

3. Analisis Data

   Setelah mengumpulkan data, tahap berikutnya adalah menganalisis data. Analisis dilakukan dengan menggabungkan unsur-unsur data dan teori secara deskriptif. Bagian ini dianggap sebagai jawaban yang ditanyakan dalam rumusan masalah.

BAB II

DINAMIKA PERSIAPAN PEMBENTUKAN IJEPA PERSPEKTIF PEMERINTAH INDONESIA

Bab ini akan membahas tentang hubungan kerja sama Indonesia – Jepang sebelum IJEPA dan proses persiapan pembentukan IJEPA. Subbab pertama berisi garis besar hubungan kedua negara, yaitu pada masa Orde Lama. Pada masa ini Indonesia mulai membangun dan menjalankan kegiatan perekonomian guna memenuhi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Sedangkan pada pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto menjalin kerjasama dengan IMF dan World Bank Padamasa pemerintahan Orde Baru ini perdagangan dan perekonomian Indonesia didominasi oleh para pemilik modal di perusahaan yang memiliki pengaruh kuat (Robison, 2014). Penjelasan terkait sebelum pembentukan perjanjian IJEPA akan diuraikan pada subbab kedua berisi rician strategi pemerintah Indonesia dalam proses persiapan pembentukan IJEPA beserta penjabarannya.

2.1. Hubungan Kerja Sama Indonesia – Jepang Sebelum IJEPA

Semenjak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Jepang dan Indonesia mulai menjalin hubungan diplomasi. Pada era Orde Lama, fokus pada politik luar negeri Indonesia adalah untuk mencari pengakuan negara lain mengenai kemerdekaan negara Indonesia. Sedangkan dari pihak pemerintah Jepang, pasca penyerahan daerah jajahannya membuat sebuah perjanjian perdamaian yang disebut Perjanjian Perdamaian San Fransisco di ahun 1951 yang berisi

Jepang akan aktif menjadi negara pemberi bantuan pembangunan sebagai bentuk ganti rugi perang kepada 12 negara di Asia termasuk Indonesia. Momen ini dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjalin kerja sama ekonomi dengan negara lain dan juga sebagai pondasi bagi rencana pengembangan negara Jepang di masa depan (Fitriani, 2015). Di tahun yang 1960 pasca bergabungnya Jepang ke dalam OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*), Jepang memberikan bantuan hibah senilai 14,28 juta US$ kepada Indonesia. Pemberian ini digunakan untuk pembangunan negara dan menjadi awalan bagi kerja sama antara Jepang dengan Indonesia berupa promosi ekspor produk-produk Jepang dan impor bahan-bahan mentah (Takashi, 2000).

Masa Orde Baru, berbeda dengan Orde Lama yang terkesan berhati-hati dalam menerima bantuan dari pihak asing, Pemerintahan Presiden Soeharto justru berfokus pada pembangunan ekonomi yang sempat mengalami keterpurukan pada masa Presiden Soekarno dengan cara membuka peluang investasi asing yang ditawarkan kepada Indonesia dengan harapan bahwa upaya ini dapat menstabilkan kondisi perekonomian Indonesia serta dapat menyokong kemajuan perdagangan bebas. Pemerintah Orde Baru membuka diri pada keberadaan modal asing, hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tanggal 1 Januari 1967 (Muharyanto, 2009). Langkah awal yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru demi mendapatkan modal dari pihak asing ialah dengan bergabung kembali dengan PBB. Langkah tersebut berhasil, Indonesia diterima kembali oleh PBB serta mendapatkan bantuan berupa pembentukan forum negara

pembantu modal yaitu *Inter-Govermental Group on Indonesia* (IGGI) yang diresmikan pada 20 Februari 1967. IGGI merupakan forum internasional yang menjadi perantara koordinasi antara Indonesia dan bank –bank Internasional dalam hal ide pembangunan dan program bantuan keuangan.

Hubungan luar negeri Indonesia dengan Jepang telah terjalin sejak tahun 1958 dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dengan Indonesia. Hingga penelitian ini dilakukan, hubungan luar negeri antara Indonesia dan Jepang masih terjalin dengan baik, bahkan terkesan semakin erat semenjak diadakannya perjanjian bilateral IJEPA (KEMLU, 2005).

2.2. Strategi Indonesia dalam Persiapan Pembentukan IJEPA

IJEPA merupakan sebuah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari strategi Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing negara di kancah global. Dari pihak Jepang diketahui bahwa pasar negara nya sudah lebih terbuka dengan produk dari Indonesia, hal ini dibuktikan dari nilai tarif bea masuk yang ditetapkan Jepang hampir mendekati 0% untuk sektor tertentu. Namun tetap harus diingat bahwa bukan hal mudah untuk memasuki pasar Jepang hal tersebut dikarenakan konsumen Jepang yang menuntut kualitas tinggi dari suatu produk dan jasa, disebabkan oleh tingkat daya beli yang tinggi, bagi konsumen Jepang harga dari produk sudah tidak menjadi masalah besar bagi sebagian besar dari mereka selama kualitas dari produk tersebut memenuhi standar selera yang ada di masyarakat Jepang.

Pemerintah Indonesia memiliki harapan bahwa perjanjian IJEPA mampu memberikan suatu kerangka kerja yang nyata dalam mendukung pengusaha

dan eksportir Indonesia untuk lebih maju agar dapat memenuhi persyaratan dan selera dari pangsa pasar Jepang. Apabila produk dari Indonesia sudah mampu lolos memasuki pasar Jepang, selanjutnya diharapkan akan lebih mudah untuk menargetkan masuk pasar di kawasan yang lebih besar seperti di Benua Eropa dan Amerika.

Di kutip dari Jurnal Kementerian Perindustrian, demi menjamin keberhasilan dari perjanjian IJEPA, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sebuah strategi sebagai berikut :

1. Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Pada Sektor Penggerak (*Driver Activities*)

   Berdasarkan pada permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia akan kebutuhan pada sektor penggerak, sebelum kesepkatan IJEPA disepakati, pemerintah Indonesia memiliki penawaran demi memajukan sektor otomotif, elektronik dan alat berat yang merupakan salah satu sektor industri prioritas yang di rasa akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Pihak Indonesia juga menginginkan adanya perencanaan bagi sektor ekspor produk unggulan untuk ditingkatkan. Rencana tersebut dapat dicapai melalui diskusi dari kedua belah pihak untuk menyamakan persepsi dan tujuan selama perioda perundingan, hal-hal yang akan diajukan telah melewati sebuah "teknik pencarian" atau disebut *common interest* dan *common enemy* di sektor ekonomi dan industri.

2. Berdasarkan pada Tingkat Permasalahan Kemiskinan Diwujudkan Melalui Program Kesejahteraan (*Prosperity Program*)

Program Kesejahteraan nantinya akan ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia melalui pembukaan akses ke pasar Jepang yang lebih luas bagi sektor produk unggulan Indonesia serta peningkatan ekspor ke mancanegara. Program ini akan disertai dengan peningkatan investasi baru dari pihak Jepang yang diikuti dengan pembangunan dan peningkatan kapasitas industri terlebih dalam upaya peningkatan daya saing industri manufaktur. Peningkatan kapasitas industri atau *capacity building* berguna agar produk dan jasa nya bisa memenuhi persyaratan mutu yang dituntut oleh pasar Jepang melalui elemen perjanjian *cooperation.*

3. Berdasarkan Pengembangan Industri Manufaktur

Program lainnya yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia ialah MIDEC (*Manufacturing Industry Development Centre*). Direncanakan bahwa dalam implementasinya MIDEC akan memiliki peranan penting yaitu sebagai penggerak dari upaya pengembangan kapasitas industri. Keberadaan MIDEC didukung oleh kedua negara karena merupakan kompensasi pembukaan akses pasar dan mampu menciptakan kondisi *win-win* bagi Indonesia dan Jepang. Secara fungsi MIDEC akan difokuskan bagi 13 sektor perekonomian Indonesia yaitu *metal working, mould & dies, welding, energy conservation, investment & industrial export promotion, small and medium-scale enterprises* (SMEs), *automotive, electric/electronics, steel* & *steel products*, *textile*, *petro* & *oleo chemical*, *non ferrous* dan *food* & *beverages.* Total kegiatan yang dicakup berjumlah 97 kegiatan seperti studi dasar, pelatihan, pembuatan sistem dan *technical assistance*. MIDEC juga

akan membantu untuk mengejar ketertinggalan bagi sektor industri penunjang (Kemenperin, 2008).

Kedua negara telah menyepakati bahwa MIDEC akan menjadi sebuah kegiatan yang besar dalam implementasi perjanjian IJEPA. Dimana dalam pelaksanaannya akan melibatkan *stake holder* dari kedua negara. MIDEC juga merupakan sebuah program yang berjangka panjang dan berkelanjutan atau disebut juga dengan *long term framework, continuing and evolving process*.

Berdasarkan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perancangan kerja sama yang akan dilakukan dalam perjanjian IJEPA memuat kepentingan – kepentingan kedua negara yang merupakan kebutuhan dari masing – masing negara. Jepang membutuhkan pasar untuk setiap produksinya, sedangkan Indonesia membutuhkan pemasok barang konsumsi baik dari sektor industri maupun manufaktur. Selain itu, bagi Indonesia dengan adanya IJEPA berpotensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena melalui perjanjian IJEPA terdapat alternatif kerja sama berupa pemberdayaan sumber daya manusia baik di bidang tenaga kerja maupun pendidikan.

Dari pemaparan tersebut menurut oleh Graham T. Allison adalah bahwa model Rational Actor juga menjelaskan tentang bagaimana peranan seorang individu pada posisi teratas dalam pemerintahan. Tindakan suatu negara paling baik dipahami sebagai akibat dari adanya proses p*oliticking* dan negosiasi dari para pemimpin atas suatu negara. Dalam kasus ini berbagai aktor yang

mewakili berbagai kepentingan terlibat dalam proses untuk mencapai keputusan yang sedang diperdebatkan menjadi kebijakan negara.

2.3. Tujuan Indonesia Dalam Pembentukan Kerja Sama IJEPA

IJEPA merupakan *Free Trade Agreement* (FTA) atau perjanjian perdagangan bilateral antara Jepang dengan Indonesia. Perjanjian bilateral pada umumnya hanya mencakup dalam bidang perdagangan berupa liberalisasi perdagangan, akan tetapi sektor-sektor lain juga dapat diikutsertakan sesuai dengan kesepakatan dan keinginan bersama dari kedua pihak. Khususnya bagi perjajian IJEPA ini cakupan isu yang dievaluasi untuk diadakan memiliki jumlah yang lebih banyak daripada yang diperjanjikan dengan WTO, sehingga perjanjian IJEPA ini dapat dikatagorikan sebagai perjanjian FTA plus (FTA++).

Dalam proses pembentukan suatu kebijakan, pemerintah terlebih dahulu memiliki bahan pertimbangan guna mencapai tujuan yang sesuai dan strategis, sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat dan negara nya. Pengambilan keputusan dilakukan oleh pemerintah sebagai agen kebijakan yang mengetahui tindakan paling strategis. Oleh karena itu dapat dilihat melalui poin-poin berikut yang merupakan analisis pertimbangan sebelum dilakukannya pengambilan keputusan oleh pemerintah, bahwa:

1. masyarakat di Indonesia banyak yang membutuhkan pekerjaan juga sebagai upaya untuk mengurangi angka pengangguran;

2. keterbatasan teknologi dalam mengelola sumber daya alam yang ada, dengan kerja sama IJEPA, SDA dapat dikelola dalam skala besar secara efektif;
3. peningkatan pendapatan masyarakat untuk mengatasi kemiskinan (Ernawati, Romika, 2016).

Secara umum dan ideal tujuan dari kerjasama bilateral dibidang ekonomi layaknya IJEPA adalah untuk meningkatkan perdagangan kedua negara dan menciptakan kondisi *win-win*. Sampai dengan saat ini, Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia yang mencapai angka USD 23,6 Milyar pada tahun 2007 atau dua kali lebih besar dari ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Sebaliknya Jepang tercatat sebagai negara dengan tingkat perdagangan peringkat tiga besar di dunia setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kerja sama dengan Indonesia memiliki peran penting untuk mempertahankan posisi tersebutf (RI K. , 2018)

Pihak Jepang juga memiliki kepentingan yang besar dari Indonesia. Selain Jepang membutuhkan produk bahan dasar dari Indonesia, Indonesia menduduki posisi pertama dalam urutan impor terbesar Jepang dalam kategori negara ASEAN (RI K. , Laporan Akhir, 2015). Indonesia juga merupakan sebuah target pasar raksasa dengan predikat konsumen terbesar keempat di dunia, yang apabila dapat dimanfaatkan akan memiliki kemampuan beli yang amat tinggi. Jepang memiliki predikat sebagai investor asing terbesar di Indonesia dengan jumlah kumulatif investasi yang telah disetujui sampai tahun 2005 sebesar USD 39 milyar, yang berarti mencapai 13% dari total investasi asing di Indonesia (KEMLU, 2005).

BAB III

ANALISIS *RATIONAL ACTOR* TERHADAP KERJA SAMA IJEPA PERSPEKTIF PEMERINTAH INDONESIA

Bab ini akan membahas tentang penjabaran analisis terhadap IJEPA menggunakan teori *decision-making process* model *Rational Actor* menurut Graham T. Allison. Model ini merupakan sebuah pengambilan keputusan dalam perencanaan pembuatan sebuah kebijakan atau perjanjian yang dirumuskan oleh aktor-aktor, kelompok atau organisasi dan pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Dalam menganalisis kasus ini penulis akan mengacu langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan menurut model *Rational Actor* yaitu:

1. *Goals & Objectives* : Tujuan dari pengambilan sebuah keputusan
2. *Alternatives* : Alternatif atau pilihan-pilihan keputusan yang tersedia
3. *Consequences* : Konsekuensi yang relevan dari *Cost*, *Benefit* dan *Constraints*
4. *Choice* : Penentuan pemilihan tindakan dengan data sebagai bahan pertimbangan pengambilan sebuah keputusan (Allison G. T., 1971).

3.1. *Goals & Objectives* Perspektif Pemerintah Indonesia Terhadap IJEPA

Menurut Graham T. Allison, Goals & Objectives didefinisikan sebagai tujuan dalam pembuatan sebuah kebijakan, dalam bab ini menganalisis tujuan dari pemerintah Indonesia dalam cakupan IJEPA. *Goals* sendiri memiliki

pengertian sebagai tujuan umum dari sebuah keputusan. Sedangkan *Objctives* merupakan tujuan khusus dari pengambilan keputusan (Allison G. T., 1971).

Tujuan akhir dari dilaksanakannya perjanjian IJEPA oleh pemerintah Indonesia adalah karena orientasi misi yang sama antara Indonesia dan Jepang yaitu dengan memperkuat struktur di bidang industri manufaktur, dengan tiga pilar utama yaitu liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan, serta *capacity building* (Kemendag, 2018). Melalui IJEPA pemerintah Indonesia mengharapkan adanya peningkatan nilai ekspor ke Jepang. Jepang sendiri merupakan partner dagang utama Indonesia, hal tersebut terlihat dari volume perdagangan kedua negara, diketahui hingga tahun 2007 tujuan ekspor nomor satu Indonesia masih diduduki oleh Jepang dengan nilai serapan sebesar 20% (KemenkumHAM, 2008).

Berikut uraian orientasi *Goals & Objectives* menurut pemerintah Indonesia:

1. Dari IJEPA Indonesia menaruh harapan pada sektor-sektor yang terdapat di dalamnya, salah satunya ialah skema *capacity building*. skema *capacity building* dapat mendorong tumbuhnya industri pendukung, termasuk UKM yang akan bermanfaat bagi perkembangan industri di Indonesia (Kemendag, 2018).
2. Untuk skema liberalisasi perdagangan bagi Indonesia, melalui IJEPA akan mengurangi hingga menghapuskan hambatan perdagangan atau bea masuk serta investasi berupa perbaikan dan kepastian hukum (Kemendag, 2018).
3. Dalam skema fasilitasi perdagangan melalui IJEPA maka Indonesia akan mendapatkan fasilitas dari Jepang diantaranya pelebaran pangsa pasar serta akses pasar yang dipermudah, Indonesia merupakan negara berkembang

yang strategis untuk dapat ditingkatkan lagi daya beli masyarakat nya melalui terbukanya lapangan kerja serta industry pendukung (Kemendag, 2018).

3.2. *Alternatives* Perspektif Pemerintah Indonesia dari IJEPA

Alternatives dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai sebuah upaya untuk mendefinisikan isu yang menjadi topik pembahasan, disertai dengan data untuk memperkuat pilihan keputusan. Menurut Graham T. Allison, kebijakan luar negeri pada umumnya dibentuk untuk mencapai tujuan atau kebutuan negara. Demi tercapainya tujuan tersebut, diperlukan pilihan-pilihan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lain, guna memudahkan proses pengambilan keputusan (Allison G. T., 1971). Dalam *alternatives* memiliki proses penentuan masalah yang disebut dengan *decision-tree* atau pohon keputusan. Dalam proses *decision-tree* topik permasalahan akan diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah kemungkinan yang dapat terjadi, guna mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dapat diartikan pula bahwa Alternatives merupakan peluang pertimbangan demi tercapainya keuntungan bagi sektor perdagangan dan jasa bagi Indonesia.

Proses alternatives dalam rencana pembentukan kerja sama dengan Jepang dalam cakupan IJEPA ialah dengan mengklasifikasikan dua pilihan alternatif *decision-tree* yaitu sebagai berikut:

a. pilihan untuk menyetujui tawaran Jepang membentuk kemitraan ekonomi bilateral

b. pilihan untuk menolak tawaran Jepang membentuk kemitraan ekonomi bilateral.

Pilihan alternatif yang ada memungkinkan Indonesia bisa mendapatkan hasil maksimal dari potensi yang memang sudah dimiliki. Dengan menyanggupi tawaran dai Jepang dalam cakupan IJEPA akan diperoleh bahwa perjanjian yang paling memberikan peningkatan dan keuntungan ekonomi yaitu pada perjanjian perdangangan yang meliputi bidang peningkatan kapasitas, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus barang di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja diantara kedua negara (Kemenperin, 2008).

Dengan adanya penurunan tarif bagi ekspor Indonesia ke Jepang, karena ekspor Indonesia ke Jepang masih didominasi oleh produk mentah tidak siap pakai dan sumber daya alam, seperti minyak, gas bumi, batu bara, kayu, atau ikan segar yang mana akan merugikan Indonesia karena nilai jual yang tidak begitu menguntungkan dibandingkan dengan nilai jual produk olahan. Kedepannya Indonesia diharapkan mampu menghasilkan produk dengan nilai jual tinggi dari sektor manufaktur dan industri yang memiliki potensi besar masuk pasar Jepang. Indonesia memiliki harapan dengan adanya IJEPA mampu mendorong dan meningkatkan investasi Jepang di Indonesia dan selanjutnya dapat membantu mengembangkan industri dan teknologi serta sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dalam jaringan produksi regional maupun internasional.

3.3. *Consequences* Perspektif Pemerintah Indonesia dari IJEPA

Consequences dapat didefinisikan sebagai pertimbangan atas konsekuensi yang ada, merujuk pada Allison terdapat tiga poin pertimbangan dalam *consequences* yaitu *Cost, Benefit dan Constraints*. *Cost* merupakan hal yang dipertaruhkan dalam pengambilan sebuah keputusan, *Benefit* merupakan keuntungan atau hasil positif yang akan didapatkan dari pengambilan keputusan, sedangkan *Constraints* merupakan kekurangan atau kendala yang dapat terjadi setelah dilakukannya pengambilan keputusan. Poin-poin pertimbangan ini nantinya akan disesuaikan dengan tujuan negara agar aktor pembuat kebijakan mampu memprediksikan langkah yang harus di ambil. Menurut Graham T. Allison, poin consequences amat berkaitan dengan poin alternative karena alternatif yang telah dijabarkan memiliki perkiraan kemungkinan dan hambatannya masing-masing (Allison G. T., 1971).

Untuk kasus IJEPA tarik menarik kepentingan sangat terlihat dalam proses pembuatan kebijakan perkonomian negara, terlebih karena kebijakan terkait kerjasama bilateral negara juga memiliki dampak yang lain seperti peningkatan SDM Indonesia, pemberdayaan SDM Indonesia, dan akuisisi beberapa perusahaan Indonesia oleh Jepang (Kemenperin, 2008).

3.3.1. *Cost, Benefit,* dan *Constraints* Bagi Indonesia Jika Menyetujui IJEPA

a) Cost

Dengan adanya perjanjian IJEPA *cost* yang akan diperoleh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Indonesia kehilangan kesempatan untuk bermitra bilateral dengan negara lain sebagai pengalaman perdana. Misalkan dengan negara Tiongkok, Korea Selatan, Turki, Belanda dan India, yang mungkin mempunyai penawaran kerja sama lebih strategis bagi Indonesia (KEMENLU, 2017).
2. Kesempatan untuk menimbang kembali keputusan penerimaan tawaran kerja sama dengan Jepang, yang sebelumnya memang sempat diragukan oleh menteri perekonomian Indonesia di tahun 2003 (Bandoro, 2010).

b) Benefit

Dengan adanya perjanjian IJEPA benefit yang akan diperoleh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Indonesia–Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) memiliki hubungan tersendiri dengan kebutuhan akan *balance of power* dari Jepang dalam mengelola kekuatan baru yang muncul di kawasan Asia, seperti adanya macan Asia baru dan kebangkitan Tiongkok. Berdasarkan fakta penelitian, Jepang telah menjadi negara yang dominan dan kuat di wilayah Asia Tenggara, terutama di bidang ekonomi dan politik. Namun dengan adanya kemunculan kekuatan baru di kawasan Asia, membuat Jepang merasa bahwa kekuatan-kekuatan baru ini merupakan ancaman bagi dominasi mereka, sehingga muncul

sebuah gagasan akan perlu nya menyeimbangkan posisi dengan kekuatan baru, dengan melancarkan FPA/EPA di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia (Gocklas, 2017).

Dengan adanya kerja sama dengan Jepang akan dapat membuka pintu kesempatan bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara lain terutama di kawasan ASEAN, melihat Jepang merupakan negara terpandang di kawasan tersebut. Pengalaman bekerja sama dengan Jepang akan membuat Indonesia memiliki peluang dan strategi yang lebih tepat kedepannya ketika merencanakan kerja sama baru guna peningkatan pengembangan negara baik di sektor ekonomi dan lainnya.

2. Terdapat beberapa poin menarik dalam tawaran kerja sama IJEPA, yaitu *Liberalization* (pembukaan akses pasar), *Facilitation* (pasar yang terbuka dan akses yang dipermudah) dan *Cooperation* (kerja sama untuk peningkatan kapasitas). Salah satu contoh nya ialah pengembangan sektor ekspor – impor, industri dan manufaktur, yang notabene merupakan hal yang dibutuhkan oleh Indonesia guna maksimalisasi potensi negara.
3. Peluang perdagangan jasa yang ditawarkan dalam perjanjian IJEPA memberikan keuntungan pada Indonesia karena mampu menurunkan angka pengangguran. Terlebih karena kondisi yang terjadi di Jepang dimana kalangan muda nya tidak berkenan untuk bekerja pada industri kategori "3D" yaitu *dusty*, *dirty* dan *danger*.
4. Pembukaan pasar Indonesia di negara partner (Jepang) melalui penghapusan tarif bea masuk yang lebih cepat dari negara lain yang

belum mempunyai kerjasama perdagangan dengan Jepang, sehingga akan membuka peluang pasar yang lebih besar.

5. Peluang lain dari pihak Jepang yaitu akan memberikan bantuan untuk meningkatkan kapasitas industri manufaktur Indonesia melalui MIDEC. MIDEC berfungsi sebagai pengendali bagi sektor tertentu yang dirasa tidak maksimal dengan bantuan asistensi dari pihak Jepang. Dengan harapan produk Indonesia dapat memenuhi persyaratan teknis atau standar yang merupakan hambatan non tarif atau *Non-Tariff Measurement* (NTM) untuk menembus pasar Jepang (Kemenperin, 2008).

c) Constraints

1. Sumber daya manusia asal Indonesia (pekerja) tidak berhasil memenuhi standar Jepang, hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya jumlah tenaga kerja yang diterima untuk bekerja di Jepang.
2. Pasca keberlangsungan IJEPA Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Diketahui hanya beberapa sektor dalam cakupan IJEPA yang baik implementasinya yaitu sektor pengelasan, pemotongan logam, otomotif, percetakan, elektronik, dan konservasi energi (Kemenperin, 2017)
3. Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, pemanfaatan skema tarif prefrensi IJEPA cenderung fluktuatif dan terbilang masih rendah. Tahun 2008, dari total ekspor produk manufaktur Indonesia, hanya sekitar 15,25% yang memanfaatkan tarif bea masuk yang telah dihapuskan (Kemenperin, 2017).

4. Ekspor produk hasil industri yang bernilai tinggi dari Indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan tren ekspor Indonesia ke Jepang merosot rata-rata 6,6 % per tahun. Sebaliknya pertumbuhan impor Indonesia dari Jepang justru meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25% per tahun (Kemenperin, 2017).
5. Penerimaan tenaga kerja khususnya perawat dan perawat lansia tidak semaksimal yang ditawarkan dalam perjanjian IJEPA (Kemendag, 2018).

3.3.2. *Cost, Benefit* dan *Constraints* Bagi Indonesia Apabila Menolak IJEPA

a) Cost

Konsekuensi yang dapat terjadi apabila pemerintah Indonesia menolak tawaran dari Jepang untuk melangsungkan kerja sama diantaranya :

1. Pasar perdagangan Indonesia tidak dapat bersinergi dengan negara lain karena tertinggal dalam aspek teknologi industri, dengan ketertinggalan ini maka Indonesia paling tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bangkit dan tidak mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain. Maka konsekuensi yang diterima pemerintah Indonesia ialah status dan sistem perekonomian negara akan terus berada di stase negara berkembang dan hal tersebut tentu akan memengaruhi perkembangan sektor perekonomian Indonesia di masa depan.
2. Rendahnya kapasitas ekspor Indonesia karena pengelolan pasar barang Indonesia yang tidak maksimal. Secara signifikan kapasitas ekspor yang peningkatannya rendah akan memengaruhi sistem perekonomian negara.

3. Sumber daya alam mentah yang tidak terolah secara maksimal, disebabkan oleh keterbatasan akan teknologi pengolah bahan baku mentah seperti batu bar, nikel, karet, kayu dan produk perikanan. Dengan adanya urgensi untuk memaksimalisasikan pengolahan bahan baku dari SDA yang melimpah, maka Indonesia memiliki pilihan untuk mendatangkan bantuan peralatan dari luar negeri. Ketidaksigapan dalam menangani pengolahan SDA tersebut hanya akan membuat Indonesia mengalami ketertinggalan dari negara maju maupun negara tetangga, karena dengan adanya pengolahan yang maksimal akan mampu menunjang perekonomian Indonesia dan berdampak pada pembangunan negara.
4. Pemberdayaan tenaga kerja berorientasi pengembangan sumber daya manusia tidak mengalami peningkatan, karena kerja sama yang dilakukan Indonesia sebelum IJEPA tidak membahas tentang pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, apabila IJEPA tidak terlaksana, maka para pekerja Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Adanya hambatan non-tarif dari Jepang berupa standar, peraturan kesehatan, standar keamanan dan spesifikasi lain yang akan diberlakukan oleh Jepang apabila Indonesia menyanggupi dibentuknya IJEPA. Hambatan non-tarif ini disebut juga "*smart regulation*" dari Jepang ke negara-negara yang akan bekerja sama dengan negara ini.

6. Ketidakseimbangan posisi antara Indonesia dan Jepang dimana Jepang berada di posisi yang lebih mapan dibandingkan dengan Indonesia terutama di bidang industri yang berteknologi tinggi.

b) Benefit

1. Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan negara lain yang dapat memberikan penawaran kerja sama lebih baik dan menguntungkan bagi Indonesia.
2. Indonesia berkesempatan untuk berusaha secara mandiri terlebih dahulu untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan perekonomian negara, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam sebuah kerja sama bilateral.

c) Constraints

1. Indonesia harus menunggu datangnya penawaran dari negara selain Jepang untuk membentuk kemitraan bilateral serupa.
2. Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam perumusan maupun implementasi kemitraan bilateral, karena IJEPA merupakan perjanjian bilateral pertama yang dibentuk oleh Indonesia dengan Jepang.
3. Penolakan akan tawaran kerja sama bilateral dengan Jepang hanya akan membuat Indonesia berada di posisi yang tidak strategis. Hal tersebut dapat memicu kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin harmonis sejak pasca pendudukan Jepang di Indonesia.

3.4. *Choice* Perspektif Pemerintah Indonesia dari IJEPA

Choice dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pemilihan alternatif terbaik berdasarkan data yang terkumpul demi hasil keputusan yang maksimal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam perencanaan maupun penyelenggaraan hal-hal yang akan dilakukan oleh negara. Pemerintah merupakan aktor individu dalam model ini yaitu sebagai satu-satunya aktor rasional dalam pembuat keputusan. Tindakan pemerintah adalah memaksimalkan nilai atau diharapkan memaksimalkan tujuan dari kepentingan nasional. Pemerintah dapat secara rasional menghitung analisis biaya dan manfaat dari setiap pilihan alternatif dan memutuskan yang terbaik untuk mencapai tujuan dan memaksimalkan utilitas yang ada (Geddes B. , 2005).

Keputusan yang dibuat merupakan suatu pilihan rasional berdasarkan pertimbangan rasional dan kalkulasi dari konsekuensi yang ada sehingga diyakini menghasilkan keputusan yang tepat yang dapat menguntungkan sebuah negara. Proses pengambilan keputusan dalam persetujuan perjanjian IJEPA banyak dipengaruhi berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan keuntungan dan solusi stratgis meningkatkan perekonomian Indonesia menjadi lebih maju melalui kerjasama dengan negara luar. Model rational actor mengasumsikan bahwa pemerintah sudah memiliki semua informasi dan alternatif untuk memeriksa situasi dan keputusan menyesuaikan dengan keadaan tertentu (RI K. , 2018).

Berdasarkan berbagai pertimbangan, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menyetujui dibentuknya perjanjian IJEPA. Diterimanya Jepang sebagai mitra *Economic Partnership Agreement* (EPA) pertama bagi

Indonesia tidak terlepas dari pengalaman hubungan saling menguntungkan yang telah berlangsung lama. Jepang merupakan mitra dagang terbesar yang menduduki peringkat pertama dalam kegiatan perdagangan Indonesia, sebagai sumber investasi yang terbesar dan sumber bantuan luar negeri bilateral yang terbesar (Kemenperin, 2008). Dari kerja sama dengan Jepang yang akan diperoleh Indonesia melalui kerangka IJEPA, sebagai berikut:

- Peningkatan Kinerja Perdagangan Barang

  Dengan adanya IJEPA laju perdagangan barang khususnya di sektor ekspor dan impor akan mengalami peningkatan dalam kuantitasnya, begitu pula di sektor industri dan manufaktur. Peningkatan kinerja ini akan ditunjang dari ketersediaan pengolahan bahan baku mentah dari sumber daya alam, penyediaan teknologi pengolahan dan edukasi kepada pekerja lokal. Adanya kesempatan untuk belajar dan transfer teknologi dari Jepang yang disebut "*know how*" dan "*know why*" (Kemenperin, 2008). Jepang sendiri merupakan negara yang sudah terbukti memiliki produk-produk berdaya saing tinggi dan diharapkan dapat menyeimbangkan kekuatan teknologi dan industri manufaktur Indonesia dengan Jepang. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah namun masih terdapat banyak halangan dalam proses pengolahannya untuk menjadi produk siap jual sehingga belum mencapai hasil yang maksimal. Dengan adanya IJEPA, maka Indonesia memiliki harapan berkembangnya sektor-sektor tersebut.

  Dalam peningkatan perdagangan barang, diketahui bahwa adanya perundingan mengenai penurunan tarif bea masuk yang dilakukan secara bertahap hingga akhirnya akan menyentuh 0%. Tahapan tersebut

dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu A, B3, B5, B7,B10, B15, P serta X. Pembagian kelompok ini berguna untuk mengklasifikasikan komoditi prioritas dari pengurangan biaya tarif bea masuk (Kemenperin, 2008).

- Peningkatan Kinerja Perdagangan Jasa

  Di sektor perdagangan jasa, Indonesia akan memiliki kesempatan untuk mengekspor jasa bisnis ke Jepang berupa jasa bisnis dan rekreasi budaya dan begitupun sebaliknya dari pihak Jepang. Upaya ini dapat dikategorikan sebagai upaya pertukaran budaya yang diharapkan dapat membawa pengaruh positif kepada kedua negara serta angin segar untuk makin mengeratkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan Jepang.

- Peningkatan Investasi

  Investasi merupakan sebuah hal penting dalam upaya peningkatan perekonomian suatu negara, investasi sendiri tidak selalu berupa uang atau modal dari negara pemberi investasi, investasi juga dapat diberikan berupa fasilitas khusus kepada negara penerima. Dengan adanya IJEPA maka investasi bukanlah hal yang harus dikhawatirkan sebab dari perjanjian bilateral ini akan makin menarik minat Jepang untuk menanamkan investasi ke Indonesia.

- Peningkatan Pengiriman Tenaga Kerja

  Ketersediaan sumber daya manusia sebagai pekerja di Indonesia terbilang cukup tinggi dapat memenuhi permintaan industri Jepang. Hal tersebut sekaligus meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pada devisa negara melalui pajak TKI di luar negeri. Pengiriman tenaga kerja perawat (*nurse*) dan perawat lansia (*caregiver*) untuk bekerja di Jepang dinilai mempu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara tidak

langsung. Perlu diingat sebelumnya bahwa Jepang memiliki standar dan kualifikasi yang cukup tinggi di bidang ketenagakerjaan. Sehingga untuk memenuhi kualifikasi tersebut dibutuhkan persiapan yang matang. Seperti yang diketahui prosedur dalam pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang akan melalui berbagai tahapan pelatihan dan pemantapan dalam bidang kerja masing-masing, sehingga ketika kembali ke Indonesia, sejumlah TKI Indonesia telah mengantongi berbagai pengalaman profesional. Dengan adanya kerja sama tersebut masyarakat usia kerja yang membutuhkan pekerjaan mendapatkan jaminan finansial.

- Peningkatan Daya Saing

  Setiap negara akan terus berusaha untuk meningkatkan daya saing dengan negara lain, hal itu dilakukan agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman baik di sektor perekonomian maupun kualitas masyarakat. Peningkatan daya saing ini, dapat terealisasikan dengan adanya skema Capacity Building dari IJEPA. Skema tersebut akan mampu mendorong keberadaan industri pendukung termasuk usaha kecil menengah (UKM) yang tentu bermanfaat bagi perkembangan sektor industri di Indonesia. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan ini dapat berupa penanaman modal kepada pelaku usaha kecil menengah, perbaikan kualitas tenaga kerja serta pengadaan teknologi pengolahan bahan mentah.

- Peningkatan Daya Beli Masyarakat

  Dengan terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya sektor ekspor dan impor, berkembangnya industri nasional serta pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada daya beli masyarakat yang meningkat. Peningkatan ini akan

membawa dampak positif bagi masyarakat Indonesia terutama yang bersangkutan langsung dengan sektor-sektor dalam cakupan IJEPA. Peningkatan daya beli masyarakat sendiri berbanding lurus dengan taraf kesejahteraan masyarakat secara ekonomi, itulah mengapa secara tidak langsung pemerintah Indonesia memiliki harapan besar terhadap perjanjian kerja sama ini.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam analisis pembentukan IJEPA yang merujuk pada teori *decision-making process* model *rational actor*, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pembuatan sebuah kebijakan atau perjanjian terdapat sejumlah langkah-langkah yang merupakan bagian penting dan harus terakumulasi dalam perencanaan tersebut. Tahapan dalam proses tersebut ialah *goals & objectives, alternatives, consequences* dan *choice*.

BAB IV

KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keputusan Indonesia untuk menyetujui tawaran Jepang untuk membuat sebuah perjanjian kerja sama merupakan hal yang paling rasional untuk dilakukan. Berdasarkan model rasional teori *decision-making process*, Indonesia menyetujui perjanjian IJEPA karena adanya pertimbangan *Goals & Objectives, Alternatives, Consequences* dan *Choice.*

Goals & Objectives didefinisikan sebagai tujuan dalam pembuatan sebuah kebijakan, dalam bab ini menganalisis tujuan dari pemerintah Indonesia dalam cakupan IJEPA. *Goals* sendiri memiliki pengertian sebagai tujuan umum dari sebuah keputusan. Sedangkan *Objectives* merupakan tujuan khusus dari pengambilan keputusan. Tujuan akhir dari dilaksanakannya perjanjian IJEPA oleh pemerintah Indonesia adalah karena orientasi misi yang sama antara Indonesia dan Jepang yaitu dengan memperkuat struktur di bidang industri manufaktur, dengan tiga pilar utama yaitu liberalisasi perdagangan, fasilitasi perdagangan, serta capacity building. Demi tercapainya tujuan dalam IJEPA pemerintah Indonesia menyiapkan strategi yaitu diantaranya : 1) Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Pada Sektor Penggerak (*Driver Activities*), 2) Berdasarkan pada Tingkat Permasalahan Kemiskinan Diwujudkan Melalui Program Kesejahteraan (*Prosperity Program*) dan 3) Berdasarkan Pengembangan Industri Manufaktur.

Alternatives dapat dijabarkan sebagai sebuah upaya untuk mendefinisikan isu yang menjadi topik pembahasan, disertai dengan data untuk memperkuat pilihan keputusan. Menurut Graham T. Allison, kebijakan luar negeri pada umum nya dibentuk untuk mencapai tujuan atau kebutuhan negara. Demi tercapainya tujuan tersebut, diperlukan pilihan-pilihan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lain, guna memudahkan proses pengambilan keputusan.

Consequences dapat didefinisikan sebagai pertimbangan atas konsekuensi yang ada, berupa *Cost, Benefit dan Constraints*.

Cost, *Benefit*, dan *Constraints* Bagi Indonesia Jika Menyetujui IJEPA :

Cost

1. Indonesia kehilangan kesempatan untuk bermitra bilateral dengan negara lain sebagai pengalaman perdana
2. Indonesia kehilangan kesempatan kesempatan untuk menimbang kembali keputusan penerimaan tawaran kerja sama dengan Jepang, yang sebelumnya memang sempat diragukan oleh menteri perekonomian Indonesia di tahun 2003.

Benefit

1. Dengan adanya kerja sama dengan Jepang akan dapat membuka pintu kesempatan bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan negara lain terutama di kawasan ASEAN, melihat Jepang merupakan negara terpandang di kawasan tersebut.
2. Terdapat beberapa poin menarik dalam tawaran kerja sama IJEPA, yaitu *Liberalization* (pembukaan akses pasar), *Facilitation* (pasar yang terbuka

dan akses yang dipermudah) dan *Cooperation* (kerja sama untuk peningkatan kapasitas).

3. Peluang perdagangan jasa yang ditawarkan dalam perjanjian IJEPA memberikan keuntungan pada Indonesia karena mampu menurunkan angka pengangguran.

Constraints

1. Kualitas pekerja asal Indonesia tidak memenuhi standar yang ditetapkan Jepang.
2. Indonesia tidak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Diketahui hanya beberapa sektor dalam cakupan IJEPA yang baik implementasinya yaitu sektor pengelasan, pemotongan logam, otomotif, percetakan, elektronik, dan konservasi energi.
3. Ekspor produk hasil industri yang bernilai tinggi dari Indonesia tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan tren ekspor Indonesia ke Jepang merosot rata-rata 6,6 % per tahun. Sebaliknya pertumbuhan impor Indonesia dari Jepang justru meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25% per tahun.

Cost, *Benefit*, dan *Constraints* Bagi Indonesia Apabila Menolak IJEPA :

Cost

1. Pasar perdagangan Indonesia tidak dapat bersinergi dengan negara lain karena tertinggal dalam aspek teknologi industri, dengan ketertinggalan ini maka Indonesia paling tidak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bangkit dan tidak mampu mengejar ketertinggalan dari negara lain.

2. Rendahnya kapasitas ekspor Indonesia karena pengelolan pasar barang Indonesia yang tidak maksimal. Secara signifikan kapasitas ekspor yang peningkatannya rendah akan memengaruhi sistem perekonomian negara.
3. Sumber daya alam mentah yang tidak terolah secara maksimal, disebabkan oleh keterbatasan akan teknologi pengolah bahan baku.
4. Pemberdayaan tenaga kerja berorientasi pengembangan sumber daya manusia tidak mengalami peningkatan, karena kerja sama yang dilakukan Indonesia sebelum IJEPA tidak membahas tentang pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Adanya hambatan non-tarif dari Jepang berupa standar, peraturan kesehatan, standar keamanan dan spesifikasi lain yang akan diberlakukan oleh Jepang apabila Indonesia bukan mitra Jepang.
6. Ketidakseimbangan posisi antara Indonesia dan Jepang dimana Jepang berada di posisi yang lebih mapan dibandingkan dengan Indonesia terutama di bidang industri yang berteknologi tinggi.

Benefit

1. Indonesia dapat menjalin kemitraan dengan negara lain yang dapat memberikan penawaran kerja sama lebih baik dan menguntungkan bagi Indonesia.
2. Indonesia berkesempatan untuk berusaha secara mandiri terlebih dahulu untuk memajukan dan meningkatkan pembangunan perekonomian negara, sebelum akhirnya memutuskan untuk bergabung dalam sebuah kerja sama bilateral.

Constraints

1. Indonesia harus menunggu datangnya penawaran dari negara selain Jepang untuk membentuk kemitraan bilateral serupa.
2. Indonesia tidak memiliki pengalaman dalam perumusan maupun implementasi kemitraan bilateral, karena IJEPA merupakan perjanjian bilateral pertama yang dibentuk oleh Indonesia dengan Jepang.
3. Penolakan akan tawaran kerja sama bilateral dengan Jepang hanya akan membuat Indonesia berada di posisi yang tidak strategis. Hal tersebut dapat memicu kerenggangan hubungan antara Indonesia dan Jepang yang telah terjalin harmonis sejak pasca pendudukan Jepang di Indonesia.

Choice dapat diartikan sebagai keberhasilan dalam pemilihan alternatif terbaik berdasarkan data yang terkumpul demi hasil keputusan yang maksimal. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting dalam perencanaan maupun penyelenggaraan hal-hal yang akan dilakukan oleh negara. Berdasarkan berbagai pertimbangan, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menyetujui dibentuknya perjanjian IJEPA. Diterimanya Jepang sebagai mitra *Economic Partnership Agreement* (EPA) pertama bagi Indonesia tidak terlepas dari pengalaman hubungan saling menguntungkan yang telah berlangsung lama.

4.2. Saran

Penelitian ini berfokus pada alasan Indonesia menyetujui dibentuknya IJEPA dengan cakupan penelitian dari tahun 2003 ketika dimulainya wacana pembentukan IJEPA hingga 2007 saat IJEPA disahkan. Sebagai tindak lanjut

dari penelitian ini, penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang akan membahas IJEPA untuk melakukan penelitian tentang implementasi IJEPA serta alasan dari pemerintah Indonesia untuk tetap melanjutkan perjanjian kerja sama ini meskipun telah diketahui tidak memberikan hasil yang diharapkan oleh Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achsani, M. N. (2017). Dampak IJEPA terhadap investasi langsung asal Jepang di Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 28.

Allison, G. T. (1971). Essence of Decision: Explaining The Cuban Missile Crisis. Boston: Little Brown and Company.

Allison, G. T. (1990). Analogi dan Modal. In M. Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional* (pp. 278-279). Jakarta.

Apridar. (2009). Ekonomi Internasional : Sejarah, Teori, Konsep Permasalahan dalam aplikasinya. In Apridar. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Archer, M. S. (1999). Realist Social Theory : The Morphogenetic Approach. Cambridge : Camridge University Press.

Ardiyanti, S. T. (2015). DAMPAK PERJANJIAN PERDAGANGAN INDONESIA-JEPANG (IJEPA). *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 132.

Atmawinata, A. (2008). Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global . *Jurnal Departemen Perindustrian*, 3-16.

Bandoro, B. (2010). *Mencari Desain Baru Politik Luar Negeri Indonesia.* Jakarta.

Bekarekar, W. W. (2016). Alasan Indonesia Dalam Melakukan Hubungan Kerjasama Dengan Melanesian Spearhead Group (MSG). *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional UMY*.

Bendor, J. d. (1992). Rethinking Allison's Models. *The American Political Science Review, Vol. 86, No. 2, Juni 1992*.

Chester, B. (2005). The Economy of Incentives (1938). In J. S. Jay M. Shafritz, *Classic of Organisation Theory 6th edition* (pp. 94-98, 109). Australia: Thomson Wadsworth.

Donald P. Green, Justin Fox. (2007). Rational Choice Theory. In W. O. Turner, *The Sage Handbook of Social Science Methodology* (pp. 273, 269-281). Nw York: Palgrave Macmillan.

Ernawati, Romika. (2016). Rencana Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran. *Jurnal FISIP Universitas Riau*.

Fawaiq, M. (2014). Peluang Ekspor Jasa Indonesia ke Jepang melalui mode 3 (Commercial Persence) dan mode 4 (Movement of Natural Persons). *Buletin Ilmiah LITBANG Perdagangan*, 7-8.

Firdaus, R. W. (2014). Implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement terhadap Defisitnya Neraca Perdagangan Sektor Non-Migas Indonesia-Jepang2008-2012. *Jurnal Universitas Airlangga Volume 3 Nomor 1*.

Fitriani, N. (2015). Pampasan Perang antara Indonesia Jepang tahun1951-1966. *respository.upi.edu*, 1.

G.T. Allison, Morton H. Halperin . (1972). Bureaucratic Politics : A Paradigm and Some Policy Implications. In *World Politics* (pp. 40-79). London: Routledge.

Geddes, B. (2005). Uses of Limitations of Rational Choice. In H. J. Wiards, *Comparative Politics : Critical concept onn Political Science* (pp. 376-377, 402). Routledge.

Geddes, B. (2005). Uses of Limitations of Rational Choice. In H. J. Wiards, Comparative Politics . *Critical concept onn Political Science (pp. 376-377, 402). Routledge.*

Gocklas, L. (2017). ANALISIS PENGARUH IJEPA TERHADAP NILAI PERDAGANGAN INDONESIA-JEPANG (Studi pada badan pusat statistik periode 2000-2016). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 50*, 192. Retrieved from), https://media.neliti.com/media/publications/188892-ID-analisis-pengaruh-indonesia-japaneconom.pdf

Guy, P. B. (2001). The Politics of Bureaucracy. In *The Politics of Bureaucracy* (pp. 182-185, 206). London and Newyork: Routledge.

gwu.edu. (2019, November 6). Retrieved from gwu.edu: https://www2.gwu.edu/~memory/data/treaties/Indonesia.pdf

Hart Paul, Anchrit Wille. (2012). Bureaucratic Politics : Opening the Black Box of Executive Government. In B. G. Pierre, *The SAGE Handbook of Public Administration* (p. 370). London: SAGE Publications.

Hidriyah, S. (2008). Fluktuasi Investasi Jepang ke Indonesia Periode 2001-2007. *University of Indonesia Thesis*.

Irianto, D. (2008). *Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi MIDEC IJEPA.* Jakarta: Departemen Perindustrian RI.

Jachock, W. W. (2016). Graham T. Allison's three dimensions of decision-making revisited : A case study of ice policy in Thailand. *Burapha University Faculty of Political Science - International Conference 2016*, 515.

Jachock, W. W. (2016). Three dimensions of decision-making revisited : A case study of ice policy in Thailand. *Jachock, W. W. and Graham T. Allison's*, 515.

Jonathan Bendor, Thomas H. Hammond. (1992). "Rethingking Allison's Model" . In *The American Political Science Review* (pp. 301-302).

KEMENDAG. (2018). Retrieved from Kemendag.go.id: http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf

Kemendag. (2018). *Fact Sheet IJEPA*. Retrieved from ditjenppi.kemendag.go.id: http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180515_fact-sheet-indonesia-japan-economic-partnership-agreement-ijepa1.pdf

KemenkumHAM. (2008). *Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.* Jakarta: Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kemenperin. (2008). *Kedalaman Struktur Industri yang Mempunyai Daya Saing di Pasar Global - Kajian capacity building industri manufaktur melalui implementasi MIDEC-IJEPA.*

Kemenperin. (2017, Desember 17). Retrieved Oktober 10, 2018, from http://www.kemenperin.go.id/artikel/8198/IJEPA-Tak-Berikan-Manfaat-Signifikan-bagi-Indonesia

Kemenperin. (2019). Retrieved from https://www.kemenperin.go.id/artikel/10785/RI-Siap-Berpaling-dari-IJEPA-(headline)

KEMLU. (2005, Mei). *Perjanjian kemitraan ekonomi Jepang-Indonesia: Laporan kelompok studi bersama/ Joint Study Group Indonesia Japan*. Retrieved from dl.ndl.go.jp:

https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_4023365_po_joint-3-2.pdf?contentNo=1&alternativeNo=

Kishida, F. (2014, May 6-7). *Japan : Half a Century of OECD Membership*. Retrieved from OECD.org: https://www.oecd.org/japan/japan-half-a-century-of-oecd-membership.htm

Komala, A. (2008). IJEPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement). *Indonesian Journal of International Law Vol. 5 no. 2*, 372.

Muharyanto. (2009). Hukum Penanaman Modal Asing. *Kedudukan Joint Venture Agreement* .

Nazir, M. (2002). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Paramita, D. (2013). Analisis Penghentian Proyek Bendungan Myitsone oleh Myanmar terhadap China Tahun 2009-2012. *jurnal Analisis Hubungan Internasional vol. 3 no. 1*.

Pfeffer, J. (1981). *Power in Organisations.* Marshfield: Pitman Publishing.

R. Kreitner, A. K. (2001). *Organizational Behaviour.* Illinoid: Burr Ridge.

RI, K. (2015). Laporan Akhir. *Analisis Review Indonesia Japan Economic Patrnership Agreement (IJEPA) dalam Perdagangan Barang*.

RI, K. (2017). Retrieved from Kemlu.go.id: https://www.kemlu.go.id/en/berita/berita-perwakilan/Pages/2018-RIJapan-Will-Celebrate-the-60th-Anniversary-Of-Diplomatic-Relations.aspx

RI, K. (2018). Fact Sheeet Indonesia Japan. In D. P. Internasional, *Ekonomic Partnersip Agreement (IJEPA).* Jakarta: Bumiputera.

Rivai, A. N. (2017). Posisi Indonesia di Tengah Fenomena Korporasi Global (Studi Kasus : Relasi DAgang Indonesia-Toyota Pasca Kesepakatan IJEPA. *Indonesian Perspective*, 127-128.

Robison, R. d. (2014). Reorganizing Power in Indonesia. *The Politics of Oligarchy in an Age of Market*, London and New York: Routledge.

Scott, J. (2014). Kebijakan PM Yingluck Shinawatra Tentang Pembatalan Ekspor Beras ke Indonesia tahun 2011. *eprints.umm.ac.id*.

Setiawan, S. (2012). Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Vol. 17 No. 2*, 1.

Simon, H. A. (2004). Decision Making : Theory and Practice. *Orion*, 144.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Alfabeta.

Tahiro. (2003). Sepak Terjang Jepang di Indonesia. Jakarta: Studio Kreativa.

Takashi, I. (2000). Japanese Foreign Policy Today, a Reader. New York: Palgrave.

Tempo. (2014, Januari 19). Kompak Menampik Saudara Tua (Jepang).

Times, T. J. (2004, November 07). Retrieved from japantimes.co.jp: https://www.japantimes.co.jp/news/2004/11/07/national/indonesia-stays-committed-to-fta/#.Xi7bTM4zbIU

Witular, R. A. (2004, December 16). *Japan-RI Plan new investment trade deal*. Retrieved from www.bilaterals.org: https://www.bilaterals.org/?japan-ri-plan-new-investment-trade

Zelikow, P. (1999). Essence of Decision : Explaining the Cuban Missike Crisis . In G. Allison. New York: Lonngman.